

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama merupakan konstruksi sosial yang dibangun berdasarkan nilai-nilai yang bersifat dogmatis¹. Dogma agama memberikan keterikatan yang kuat, baik secara lahir atau batin, pada setiap individu atau kelompok yang menjalankannya². Dogma agama merujuk pada seperangkat keyakinan, ajaran, atau prinsip yang dianggap mutlak dan tidak boleh dipertanyakan dalam suatu agama³. Dogma dalam agama berfungsi sebagai fondasi yang mengikat individu dan kelompok dalam sistem kepercayaan yang sama⁴.

¹ Pernyataan bahwa "Agama merupakan konstruksi sosial yang dibangun berdasarkan nilai-nilai yang bersifat dogmatis" dapat dianalisis dari perspektif sosiologi dan filsafat. Agama sebagai Konstruksi Sosial merujuk pada ide bahwa realitas tertentu diciptakan dan dipahami melalui interaksi sosial dan kesepakatan bersama dalam masyarakat. Dalam konteks agama, ini berarti bahwa agama tidak hanya muncul dari wahyu ilahi atau kebenaran absolut, tetapi juga dibentuk oleh nilai-nilai, norma, dan praktik yang dikembangkan oleh manusia dalam masyarakat. Agama sebagai konstruksi sosial menunjukkan bahwa sistem kepercayaan, ritual, dan institusi keagamaan dibentuk oleh konteks historis, budaya, dan sosial tertentu. Misalnya, bentuk dan praktik agama di suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh struktur politik, ekonomi, dan budaya setempat. Nilai-Nilai Dogmatis merujuk pada keyakinan atau doktrin yang diterima tanpa kritik atau pertanyaan. Dalam agama, nilai-nilai dogmatis sering dianggap sebagai kebenaran mutlak yang tidak boleh diubah atau dipertanyakan. Dogma dalam agama berfungsi untuk mempertahankan stabilitas dan kohesi sosial, tetapi juga dapat membatasi pemikiran kritis dan inovasi. Nilai-nilai dogmatis ini sering diwariskan dari generasi ke generasi melalui pendidikan, ritual, dan tradisi. Ungkapan ini mengundang pertanyaan tentang sejauh mana agama merupakan produk manusia (sosial) versus wahyu ilahi. Emile Durkheim melihat agama sebagai cerminan dari struktur sosial dan kebutuhan kolektif masyarakat. Durkheim dalam bukunya *The Elementary Forms of Religious Life* (1912) berargumen bahwa agama adalah cara masyarakat mengkonseptualisasikan dirinya sendiri. Di sisi lain, pandangan ini dapat dianggap reduktif oleh mereka yang memandang agama sebagai sesuatu yang transenden dan berasal dari sumber ilahi, bukan sekadar konstruksi manusia. Tesis ini pernah dikemukakan oleh beberapa pemikir studi agama seperti: Emile Durkheim dalam *The Elementary Forms of Religious Life* (1912) – Durkheim menjelaskan agama sebagai produk sosial yang mencerminkan solidaritas dan nilai-nilai kolektif; Peter L. Berger dalam *The Sacred Canopy* (1967) – Berger mengembangkan teori konstruksi sosial realitas, termasuk agama, sebagai cara manusia memberikan makna pada dunia, dan Karl Marx dalam *Critique of Hegel's Philosophy of Right* (1844) – Marx melihat agama sebagai "candu masyarakat," yang digunakan untuk mempertahankan *status quo* dan mengalihkan perhatian dari ketidakadilan sosial.

² Emile Durkheim, *The Elementary Forms of the New Religious Life: Volume 3*, ed. Karen E. Fields, *Library of Congress in Publication Data*, 3rd ed., vol. 3 (New York: The Free Press, 1995).

³ Durkheim, *The Elementary Forms of the New Religious Life: Volume 3*, vol. 3, p. .

⁴ Durkheim, *The Elementary Forms of the New Religious Life: Volume 3*, vol. 3, p. .

Nilai-nilai yang terdapat dalam dogma agama dapat dikonseptualisasikan ke dalam sebuah bentuk gerakan sosial⁵. Nilai-nilai yang terkandung dalam dogma, seperti keadilan, kesetaraan, kasih sayang, atau perlawanan terhadap ketidakadilan, sering kali memiliki potensi untuk menginspirasi tindakan kolektif⁶. Sebagai hasil dari kontruksi sosial, agama memungkinkan untuk dijadikan sebagai alat dalam melakukan aktivitas sosial seperti organisasi atau institusi⁷.

Organisasi sosial memiliki banyak orientasi dalam gerakannya⁸. Menurut Giddens, organisasi sosial adalah entitas yang dibentuk oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, biasanya terkait dengan isu-isu sosial, agama, politik, ekonomi, atau budaya⁹. Dari definisi tersebut, organisasi keagamaan dapat dikategorikan sebagai organisasi sosial terlebih lagi jika organisasi keagamaan tersebut terafiliasi kepada partai politik, hal tersebut menebalkan kategorinya sebagai organisasi yang berorientasi pada isu sosial, agama, dan politik¹⁰.

Agama sebagai sebuah aset sosial yang paling berpengaruh, memiliki peran signifikan dalam membentuk nilai, norma, dan praktik kehidupan masyarakat¹¹. Dalam konteks Indonesia, agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk

⁵ Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam dogma agama tidak hanya bersifat spiritual atau individual, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk aksi kolektif atau gerakan sosial. Analisis ini akan mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai agama, yang sering dianggap dogmatis dan absolut, dapat menjadi dasar bagi mobilisasi sosial, perubahan politik, atau transformasi masyarakat.

⁶ Max Weber, *Sociology of Religion*, *Journal of the American Academy of Religion*, vol. 20, 1952.

⁷ Dede Setiawan, "Peran Agama Dalam Aktivitas Pelestarian Alam: Studi Deskriptif Pada Front Nahdliyyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam, FNKSDA," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 1 (2022): 1–18.

⁸ Pernyataan bahwa "organisasi sosial memiliki banyak orientasi dalam gerakannya" mencerminkan keragaman tujuan dan pendekatan yang dimiliki oleh organisasi sosial. Orientasi ini dipengaruhi oleh konteks sosial, latar belakang pendiri, sumber daya, dan lingkungan politik. Dengan memahami keragaman ini, kita dapat lebih menghargai peran organisasi sosial dalam menciptakan perubahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁹ Anthony Giddens, *Sociology*, 6th ed. (New York: Polity Press, 2006).

¹⁰ Septi Nur Wijayanti and Kelik Iswandi, "Peran Organisasi Sayap Partai Politik Dalam Kaderisasi Partai Politik Di Indonesia," *Sasi* 27, no. 4 (2021): 475.

¹¹ Weber, *Sociology of Religion*, vol. 20, p. .

mencapai tujuan sosial, politik, dan ekonomi¹². Salah satu manifestasi dari pemanfaatan aset agama adalah melalui organisasi keagamaan yang terafiliasi dengan partai politik¹³. Organisasi semacam ini sering kali menjadi wadah untuk menggerakkan partisipasi masyarakat, termasuk kelompok perempuan, dalam aktivitas sosial dan politik¹⁴.

Organisasi keagamaan sayap partai memiliki peran strategis dalam membentuk dinamika sosial-politik di Indonesia, terutama dalam menggerakkan partisipasi perempuan dalam berbagai aktivitas keagamaan dan politik¹⁵. Salah satu organisasi yang cukup menonjol dalam aspek ini adalah Pengajian Al-Hidayah Partai Golkar Kabupaten Bandung. Organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah pengajian dan pembinaan spiritual, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Partai Golkar adalah satu partai politik tertua di Indonesia¹⁶. Partai Golkar tercatat sudah berpengalaman dalam memanfaatkan aset agama melalui organisasi

¹² Martin van Bruinessen, *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn,"* 1st ed. (Singapore: ISEAS Publishing, 2015).

¹³ Organisasi keagamaan di Indonesia memiliki basis massa yang kuat, yang dapat dimanfaatkan oleh partai politik untuk memperoleh legitimasi dan dukungan elektoral. Partai-partai politik yang memiliki afiliasi dengan organisasi keagamaan cenderung mendapatkan keuntungan dalam hal mobilisasi massa dan penyebaran ideologi. Afiliasi organisasi keagamaan dengan partai politik dapat mengarah pada politisasi agama, di mana ajaran dan simbol keagamaan digunakan untuk kepentingan politik praktis. Hal ini sering terjadi dalam momentum pemilu atau pilkada, di mana tokoh agama dan institusi keagamaan didekati oleh partai politik untuk mendapatkan dukungan.

¹⁴ Bruinessen, *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn."*

¹⁵ Bayu Mitra Adhyatma Kusuma and Theresia Octastefani, "Negosiasi Dakwah Dan Politik Praktis (Membaca Orientasi Organisasi Sayap Keagamaan Islam Pada Partai Nasionalis)," *al-Balagh : Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 2, no. 1 (2017): 1–24.

¹⁶ Partai Golongan Karya (Golkar) merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam dinamika politik nasional. Awalnya, Golkar terbentuk pada tahun 1964 sebagai Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang berfungsi sebagai wadah organisasi sosial-politik untuk menghadapi dominasi partai-partai politik saat itu. Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Golkar berkembang menjadi kendaraan politik utama pemerintah dan mendominasi pemilu selama lebih dari tiga dekade. Setelah reformasi 1998, Golkar bertransformasi menjadi partai politik yang berkompetisi dalam sistem demokrasi multipartai. Meskipun mengalami pasang surut dalam perolehan suara, Golkar tetap menjadi kekuatan politik yang signifikan dengan basis dukungan kuat di berbagai daerah dan memiliki jaringan organisasi yang luas, termasuk sayap-sayap organisasi keagamaan dan sosial. Lihat dalam Akbar Tandjung, *The Golkar Way: Survival Partai Golkar Di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, (Jakarta : Gramedia, 2019).

sayapnya¹⁷. Dan Pengajian Al-Hidayah merupakan salah satu organisasi sayap Partai Golkar yang memiliki keunikan tersendiri, yakni memiliki dimensi yang multi sektoral; sebagai organisasi keagamaan, organisasi perempuan, dan organisasi politik¹⁸. Sehingga, menjadikan Pengajian Al-Hidayah tidak hanya berfungsi sebagai forum keagamaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan perempuan. Melalui aktivitas keagamaan yang dilakukan Pengajian Al-Hidayah, perempuan diberikan ruang untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan kapasitas kepemimpinan, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Pengajian Al-Hidayah adalah salah satu organisasi sayap keagamaan yang berada di bawah naungan Partai Golkar, yang memiliki tujuan untuk memberikan pembinaan agama kepada umat Islam di Indonesia melalui pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya¹⁹. Visi dari Pengajian Al-Hidayah adalah untuk membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menciptakan keterlibatan aktif umat Islam dalam pembangunan bangsa sesuai dengan nilai-nilai agama dan Pancasila²⁰. Organisasi ini didirikan pada tahun 1980-an dan sejak itu terus berkembang, menjadi wadah yang menghubungkan Partai Golkar dengan kalangan umat Islam di berbagai daerah di Indonesia²¹. Sejarah berdirinya Pengajian Al-Hidayah berawal dari keinginan Partai Golkar untuk

¹⁷ Partai Golkar memiliki sejumlah organisasi sayap yang memanfaatkan aset agama sebagai bagian dari strategi politik dan sosialnya. Salah satu organisasi yang menonjol adalah Pengajian Al-Hidayah, yang berperan dalam pembinaan spiritual dan sosial bagi perempuan Muslim melalui pengajian rutin, pendidikan keagamaan, serta kegiatan sosial. Selain itu, Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) berfungsi sebagai lembaga dakwah yang bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam di kalangan kader dan simpatisan Partai Golkar melalui berbagai kegiatan keagamaan, seperti seminar dan kajian keislaman. Organisasi lain yang memiliki peran strategis adalah Satkar Ulama Indonesia, yang beranggotakan ulama dan tokoh agama Islam serta berperan dalam memberikan legitimasi keagamaan terhadap kebijakan politik partai

¹⁸ Iin Kandedes and Bobi Erno Rusadi, "Kontribusi Pengajian Al-Hidayah Dalam Meningkatkan Iman Dan Imun Umat Pada Masa Pandemi Covid-19," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 02 (2022): 599–616.

¹⁹ Kandedes and Rusadi, "Kontribusi Pengajian Al-Hidayah Dalam Meningkatkan Iman Dan Imun Umat Pada Masa Pandemi Covid-19."

²⁰ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Hasil Muktamar VIII DPP Pengajian Al-Hidayah Tahun 2021 di Jakarta.

²¹ Syahrin Harahap, "Pengajian Al-Hidayah," *Ensiklopedia Islam*, last modified 2022, accessed February 3, 2025, <https://ensiklopediaislam.id/al-hidayah-pengajian/>.

memperkuat basis politiknya melalui pendekatan keagamaan, yang dirasa penting dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim²².

Pengurus tingkat pusatnya terdiri dari tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh di Partai Golkar, dengan pengurus utama yang biasanya dipilih dari kalangan kader Golkar yang berkomitmen terhadap pengembangan dakwah Islam dan pemahaman agama yang moderat, serta mendorong tercapainya kesejahteraan sosial melalui sinergi antara agama dan politik. Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah saat ini adalah Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P., yang terpilih pada Mukhtamar VIII pada Desember 2021. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Anggota DPR RI periode 2024-2029. Di bawah kepemimpinannya, Pengajian Al-Hidayah fokus pada pemberdayaan pendidikan, perempuan, ekonomi, dan kesehatan, serta memperkuat sinergi dengan program-program pemerintah dan Partai Golkar²³.

Dalam konteks politik Indonesia, aset agama (*religious assets*) menjadi instrumen yang digunakan oleh berbagai partai untuk memperkuat basis massa dan memperluas pengaruhnya²⁴. Aset agama mencakup modal sosial, simbolik, dan material yang dimiliki oleh organisasi keagamaan yang berafiliasi dengan partai politik²⁵. Keberadaan aset agama dalam organisasi keagamaan sayap partai seperti Pengajian Al-Hidayah memungkinkan terjadinya proses pemberdayaan perempuan yang lebih luas, baik dalam aspek personal, sosial, maupun politik.

Pemberdayaan perempuan dalam organisasi keagamaan sayap partai menjadi isu yang menarik dalam kajian agama dan politik, khususnya dalam konteks

²² Harahap, "Pengajian Al-Hidayah."

²³ Irman, "Terpilih Ketua Umum Pengajian Al-Hidayah, Hetifah Berjanji Perkuat Pemberdayaan Pendidikan Dan Ekonomi," *Kabargolkar.Com*, last modified 2021, accessed February 3, 2025, https://kabargolkar.com/read/kabar_parlemen/20386/terpilih-ketua-umum-pengajian-al-hidayah-hetifah-berjanji-perkuat-pemberdayaan-pendidikan-dan-ekonomi/2.

²⁴ Christian Smith, *Disruptive Religion: The Force of Faith in Social Movement Activism* (New York: Routledge, 1996).

²⁵ Setiawan, "Peran Agama Dalam Aktivitas Pelestarian Alam: Studi Deskriptif Pada Front Nahdliyyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam, FNKSDA."

Indonesia sebagai negara dengan tingkat religiusitas yang tinggi²⁶. Keberadaan organisasi keagamaan yang berafiliasi dengan partai politik mencerminkan sinergi antara agama dan politik dalam membentuk kesadaran sosial serta meningkatkan partisipasi perempuan di ranah publik²⁷. Pemberdayaan perempuan merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, maupun budaya, sehingga mereka dapat mengambil keputusan secara mandiri dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat²⁸. Dalam konteks Pengajian Al-Hidayah Partai Golkar Kabupaten Bandung, memerlukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana penggunaan Aset Agama dan bentuk Pemberdayaan Perempuan dalam aktivitas organisasi yang dilakukan mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tesis dengan mengangkat judul **“ASET AGAMA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM AKTIVITAS ORGANISASI KEAGAMAAN SAYAP PARTAI (Studi Kasus pada Pengajian Al-Hidayah Partai Golkar Kabupaten Bandung)”**. Judul penelitian ini diangkat berdasarkan penelaahan mengenai hasil penelitian terdahulu yang relevan. Baik relevan dari sisi tema penelitian, objek penelitian, atau metodologi.

²⁶ Pemberdayaan perempuan dalam organisasi keagamaan sayap partai telah menjadi topik yang semakin menarik perhatian dalam kajian agama dan politik, terutama di Indonesia, yang dikenal dengan tingkat religiusitas yang tinggi. Penelitian tentang topik ini menunjukkan bagaimana perempuan dalam organisasi tersebut dapat memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak mereka sambil menjaga identitas keagamaan dan politik. Menurut penelitian oleh Azra (2007), Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, menawarkan konteks yang unik terkait dengan interaksi antara agama dan politik, yang mempengaruhi posisi perempuan dalam struktur sosial dan politik. Dalam hal ini, organisasi keagamaan yang terafiliasi dengan partai politik sering kali menjadi arena penting bagi perempuan untuk terlibat dalam keputusan-keputusan politik, meskipun seringkali menghadapi tantangan terkait dengan norma-norma gender yang konservatif (Budianta, 2014). Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan dalam konteks ini menjadi salah satu kunci untuk memahami dinamika kekuasaan dan gender dalam politik Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor keagamaan.

²⁷ Qisthi Faradina Ilma Mahanani et al., “ISLAM AND POLITICS IN INDONESIA (Historical Perspective),” *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 3, no. 1 (2022): 61–69.

²⁸ Nieke Masruchiyah and Antonia Junianty Laratmase, “Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Era Revolusi Industri 4.0,” *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan* 12, no. 2 (2023): 125–138.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang pada penelitian ini, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profil sejarah Pengajian Al-Hidayah dan perkembangan eksistensinya di Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana bentuk penggunaan Aset Agama dalam aktivitas organisasi yang dilakukan oleh Pengajian Al-Hidayah di Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana bentuk pemberdayaan perempuan dalam aktivitas organisasi yang dilakukan oleh Pengajian Al-Hidayah di Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian lazimnya memuat target capaian dalam usaha menjawab rumusan masalah. Penelitian ini setidaknya diproyeksikan untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mendalami pengetahuan terkait bagaimana profil sejarah Pengajian Al-Hidayah dan perkembangan eksistensinya di Kabupaten Bandung;
2. Mendalami pengetahuan mengenai bagaimana bentuk penggunaan Aset Agama dalam aktivitas organisasi yang dilakukan oleh Pengajian Al-Hidayah di Kabupaten Bandung, dan;
3. Mendalami pengetahuan tentang bagaimana bentuk pemberdayaan perempuan dalam aktivitas organisasi yang dilakukan oleh Pengajian Al-Hidayah di Kabupaten Bandung.

Secara garis besar, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aset agama dalam aktivitas organisasi keagamaan sayap partai (variabel independen) memengaruhi pemberdayaan perempuan (variabel dependen) dalam konteks Pengajian Al-Hidayah Partai Golkar Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian sudah seyogianya mempunyai unsur kebermanfaatan. Hasil dari penelitian harus berorientasi pada nilai-nilai kebermanfaatan, baik dari segi praktis ataupun teoritis. Penelitian ini ditunjukkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diproyeksikan mampu menambah ekspansi kajian ilmiah di bidang studi agama-agama pada umumnya dan secara khusus untuk literatur akademik pada mata kuliah Agama dan Politik.
 - b. Penelitian ini juga mengangkat topik pemberdayaan perempuan yang tentunya memiliki relevansi secara teoritis pada kajian mata kuliah Agama dan Gender. Kajian yang disorot dalam penelitian ini, secara spesifik akan memotret bagaimana persuasi politik dan pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Pengajian Al-Hidayah Kabupaten Bandung yang memiliki 3 dimensi segmentasi sebagai sebuah organisasi; sebagai organisasi sayap partai, organisasi perempuan, dan organisasi keagamaan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dapat menjadi rekomendasi akademik bagi institusi terkait, yakni umumnya untuk Partai Golkar Kabupaten Bandung dan secara khusus untuk Pengajian Al-Hidayah Kabupaten Bandung. Rekomendasi akademik penting untuk dijadikan sumber rujukan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di organisasi.
 - b. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai dokumen sekunder selain Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau arsip organisasi lainnya, jika di kemudian hari diperlukan. Secara praktis, penelitian ini juga dapat lebih menegaskan keberadaan organisasi terkait dalam konteks politik dan pemberdayaan organisasi di tengah-tengah masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berupaya untuk menjabarkan penggunaan agama dalam melakukan pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Organisasi Keagamaan Sayap Partai dalam hal ini Pengajian Al-Hidayah. Dengan memanfaatkan Teori Aset Agama dari Christian Smith sebagai Teori Utama (*Grand Theory*) dan Teori Empowerment dari Jullian Rappaport sebagai Teori Pendukung (*Middle Theory*)²⁹.

Christian Stephen Smith merupakan seorang sosiolog asal Amerika Serikat yang kini menjabat sebagai Profesor Sosiologi di University of Notre Dame. Fokus utama penelitiannya mencakup kajian tentang agama dalam konteks modernitas, dinamika kehidupan remaja dan dewasa muda, teori sosiologi, filsafat ilmu pengetahuan, studi tentang kedermawanan, evangelikalisme di Amerika, serta aspek-aspek budaya. Smith dikenal luas atas kontribusinya dalam bidang sosiologi agama, terutama melalui studi mendalamnya mengenai spiritualitas pada kalangan remaja. Ia juga memberikan sumbangan penting terhadap teori sosiologi dan dikenal sebagai pendukung utama pendekatan realisme kritis dalam ilmu sosial³⁰.

Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Smith pada tahun 1996 dalam bukunya yang berjudul *Disruptive Religion: The Force of Faith in Social Movement Activism*. Buku ini tidak ditulis oleh Smith sendiri, di dalamnya terdapat tulisan-tulisan dari cendekiawan lain yang membahas seputar isu agama yang menjadi sumber kekuatan dalam aktivitas organisasi sosial³¹.

²⁹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, SAGE Publication, Cetakan Ketiga. (London: SAGE Publications, Inc., 2009).

³⁰ Christian Smith, "The Best Days of Their Lives?," *The Economist*, disunting terakhir 17 September 2011, diakses pada 9 Mei 2025, <https://www.economist.com/books-and-arts/2011/09/17/the-best-days-of-their-lives>.

³¹ Dalam bukunya yang berjudul *Disruptive Religion: The Force of Faith in Social Movement Activism*, Christian Smith mengungkapkan peran penting agama dalam membentuk dan memobilisasi gerakan sosial, dengan fokus pada bagaimana keyakinan-kepercayaan agama dapat menjadi kekuatan yang menggerakkan aktivisme sosial yang bersifat mengganggu. Buku ini memberikan perspektif yang tajam mengenai hubungan antara agama dan gerakan sosial, yang seringkali dianggap sebagai dua hal yang terpisah, atau bahkan bertentangan. Namun, Smith menunjukkan bagaimana agama—baik dalam bentuk tradisional maupun kontemporer—memiliki kekuatan yang mampu menggerakkan perubahan sosial yang signifikan. Smith menyelidiki bagaimana agama dapat menjadi kekuatan transformatif dalam gerakan sosial, dengan membahas berbagai contoh gerakan sosial di mana agama berperan sebagai pendorong utama. Ia menjelaskan bahwa agama tidak hanya memberikan motivasi moral dan spiritual bagi para

Salah satu tulisan Smith dalam buku tersebut berjudul *Correcting a Curious Neglect, or Bringing Religion Back In* (Memperbaiki Pengabaian yang Karena Penasaran, atau Membawa Kembali Agama). Dalam tulisan tersebut, Smith menjelaskan sejumlah properti dan sumber daya agama yang berbeda, meskipun saling terkait erat, yang dikelompokkan di bawah kategori umum, yang dapat dan memang berfungsi sebagai aset penting untuk aktivitas organisasi sosial³². Smith menyebut ada 6 (enam) Aset pada Agama yang menjadi kekuatan dalam gerakan sosial.

Pertama, Motivasi Transenden (Transcendent Motivation) yakni seperangkat legitimasi yang bersumber dari teks suci agama untuk dijadikan pendorong dalam gerakan sosial.

aktivis, tetapi juga menawarkan struktur sosial dan sumber daya simbolik yang dapat memperkuat komitmen mereka terhadap tujuan bersama. Agama, menurut Smith, memiliki potensi untuk memberikan solusi terhadap tantangan utama dalam gerakan sosial, yaitu motivasi dan komitmen yang konsisten dari para partisipan, terutama ketika aktivisme tersebut menuntut pengorbanan besar. Dalam bukunya, Smith mengidentifikasi beberapa atribut dan aset agama yang mendukung aktivisme sosial, termasuk motivasi transendental, komunitas berbasis iman, dan identitas spiritual yang kuat. Ia menjelaskan bahwa agama menyediakan makna yang lebih dalam bagi individu dan kelompok yang terlibat dalam aktivisme, sehingga mereka merasa terdorong untuk bertindak demi tujuan sosial yang lebih besar. Agama memberikan kerangka moral yang memperkuat keyakinan para aktivis bahwa tindakan mereka adalah panggilan ilahi atau kewajiban moral, bukan sekadar tindakan politik atau sosial biasa.

Selain itu, buku ini juga membahas bagaimana gerakan sosial berbasis agama seringkali berfokus pada isu-isu ketidakadilan sosial, kemanusiaan, dan perubahan struktur sosial. Smith mencatat contoh-contoh seperti gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat dan gerakan pembebasan di Amerika Latin, yang keduanya dipengaruhi kuat oleh ajaran agama dan motivasi iman. Dalam konteks ini, agama berfungsi sebagai alat yang membangkitkan solidaritas dan persatuan di antara para aktivis, membentuk ikatan sosial yang memperkuat daya tahan gerakan tersebut.

Namun, Smith juga mengingatkan tentang tantangan yang dihadapi agama dalam gerakan sosial, terutama ketika keyakinan agama yang keras bisa berpotensi menciptakan konflik atau radikalisasi. Ia mengingatkan agar kita tidak mengidealikan agama sebagai kekuatan pendorong yang selalu positif dalam gerakan sosial, mengingat juga potensi penyalahgunaan agama untuk tujuan-tujuan yang merugikan.

Secara keseluruhan, *Disruptive Religion* adalah buku yang mendalam dan penuh wawasan, yang menawarkan analisis komprehensif tentang bagaimana agama dapat menjadi kekuatan disruptif dalam gerakan sosial. Christian Smith berhasil mengubah pandangan kita tentang agama dan aktivisme sosial, dengan menyoroti bahwa agama bukanlah kekuatan yang terpisah atau marginal dalam konteks perubahan sosial, tetapi justru bisa menjadi katalisator utama untuk transformasi sosial yang lebih besar. Buku ini sangat relevan bagi mereka yang tertarik pada hubungan antara agama, gerakan sosial, dan perubahan sosial di dunia modern.

³² Smith, *Disruptive Religion: The Force of Faith in Social Movement Activism*.

Kedua, Sumber Daya Organisasional (*Organizational Resources*), adalah sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk melakukan aktivitas sosialnya.

Ketiga, Identitas Bersama (*Shared Identity*), adalah sebuah sikap solidaritas yang didasarkan pada identitas bersama yang melekat pada setiap individu yang melakukan gerakan sosial.

Keempat, Posisi Sosial Dan Geografis (*Social And Geographic Positioning*), Smith menilai agama memiliki kekuatan posisi organisasi yang menembus batas-batas teritorial dan dimungkinkan dapat melakukan ekspansi.

Kelima, Legitimasi Yang Diuntungkan (*Privileged Legitimacy*), satu aset yang dimiliki agama yang dinilai oleh Smith dapat dijadikan sebagai pembenaran atas gerakan sosial.

Keenam, Kepentingan Intitusional (*Institutional Self-Interests*). Smith meyakini bahwa setiap bentuk kepercayaan yang terlembaga menjadi suatu agama, memiliki kepentingan institusi nya sendiri. Bisa sebuah kepentingan yang bersifat utopis atau pragmatis³³.

Julian Rappaport merupakan seorang psikolog asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan konsep pemberdayaan dalam ranah pekerjaan sosial dan psikiatri sosial. Atas kontribusinya yang signifikan, ia menerima sejumlah penghargaan bergengsi, termasuk *Distinguished Career Award* dari Divisi Psikologi Komunitas American Psychological Association, serta *Seymour B. Sarason Award* yang diberikan atas pemikiran kritis dan inovatif dalam merefleksikan ulang berbagai asumsi dasar serta pendekatan terhadap layanan kemanusiaan, pendidikan, dan penelitian komunitas. Karya pentingnya dalam kajian pemberdayaan dirangkum dalam buku *Studies in Empowerment* yang diterbitkan pada tahun 1984³⁴.

³³ Smith, *Disruptive Religion: The Force of Faith in Social Movement Activism*.

³⁴ Julian Rappaport, "Terms of Empowerment/Exemplars of Prevention: Toward a Theory for Community Psychology," *American Journal of Community Psychology* 15, no. 2 (1987): 121–148.

Rappaport memandang bahwa pemberdayaan merupakan proses yang membantu individu, kelompok, atau komunitas guna memperoleh kontrol atas hidup mereka melalui penguatan kapasitas dan partisipasi yang bersifat aktif dalam pengambilan keputusan³⁵. Fokus utama pemberdayaan menurut Rappaport ada pada tiga aspek: Partisipasi Aktif, Penguatan Kapasitas, dan Pengambilan Keputusan yang Otonom³⁶.

Partisipasi Aktif memiliki arti bahwa individu atau komunal terlibat secara langsung dalam proses perumusan dan pelaksanaan tindakan yang akan berdampak pada hidup mereka. Penguatan Kapasitas merujuk pada proses meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang diperlukan agar individu atau kelompok dapat menjalankan peran mereka secara efektif dalam membuat perubahan. Lalu, pengambilan keputusan yang otonom berarti individu atau kelompok mempunyai kendali atas penentuan arah tindakan tanpa ada tekanan yang dominan dari pihak eksternal³⁷.

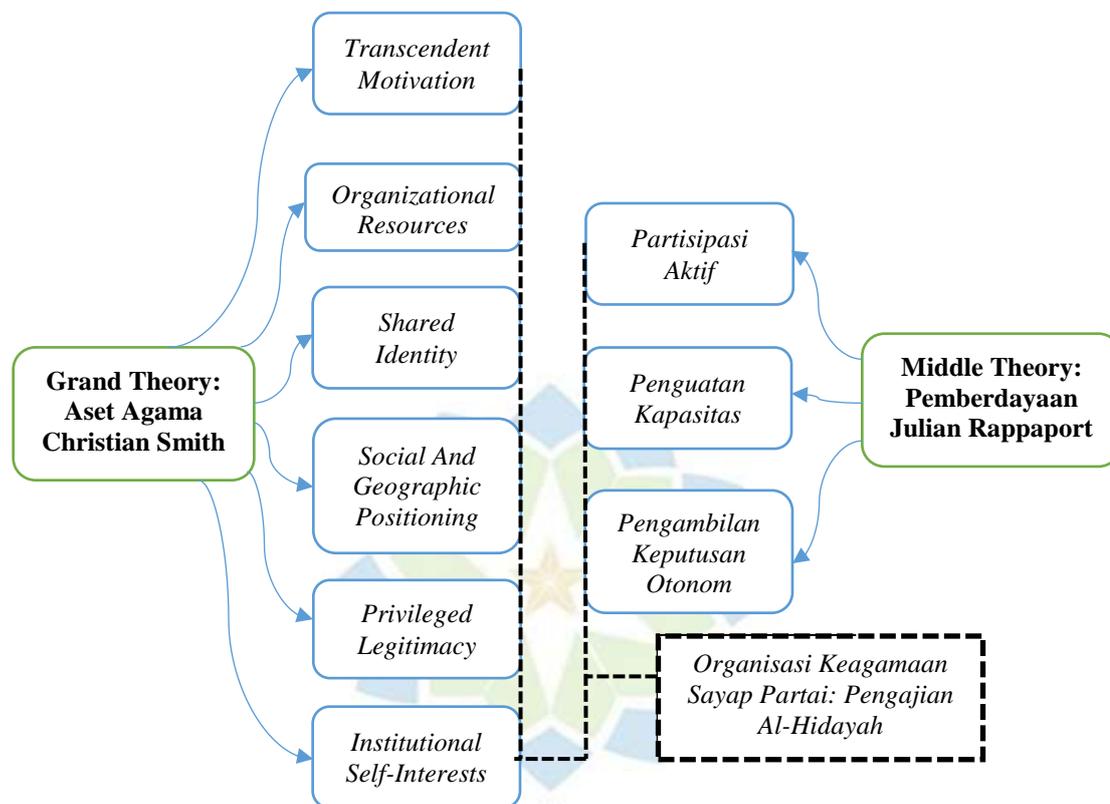
Penggunaan kedua teori tersebut bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pengajian Al-Hidayah sebagai organisasi keagamaan sayap partai menggunakan aset agama yang kemudian dijadikan sebagai modal untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan dalam setiap aktivitas organisasinya. Perhatikan peta konsep dibawah ini untuk lebih mempermudah alur pemikiran dalam penelitian ini:

³⁵ Julian Rappaport, "In Praise of Paradox: A Social Policy of Empowerment over Prevention," *American Journal of Community Psychology* 9, no. 1 (1981): 1–25.

³⁶ Rappaport, "In Praise of Paradox: A Social Policy of Empowerment over Prevention."

³⁷ Rappaport, "In Praise of Paradox: A Social Policy of Empowerment over Prevention."

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran



Kedua teori yang digunakan pada penelitian ini nantinya akan disistematisasikan ke dalam bangunan narasi yang logis dan dianalisis melalui pengkontekstualisasian pada fenomena yang menjadi objek penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Mengacu pada pedoman penulisan tesis dan disertasi yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, struktur penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab, di mana masing-masing bab memiliki ruang lingkup dan fokus yang jelas guna menunjang kesinambungan alur penelitian.

1. Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berfungsi sebagai landasan awal penelitian. Pada bagian ini, dijelaskan latar belakang yang memperkuat urgensi dilakukannya penelitian, perumusan masalah sebagai titik sentral pembahasan, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian,

manfaat penelitian baik dari sisi teoritis maupun praktis, serta kerangka berpikir yang menjadi dasar konseptual, dan penjabaran sistematikan pembahasan. Dengan demikian, bab ini memberikan gambaran menyeluruh bagi pembaca mengenai konteks, signifikansi, serta arah penelitian secara keseluruhan.

2. Bab II memuat tinjauan pustaka dan teori yang berisikan kajian atau penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini dan penjabaran lanjutan dari teori-teori yang digunakan pada penelitian ini.
3. Bab III memuat metodologi penelitian yang berisikan pedoman teknis penelitian ini. Mencakup detail seperti pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta tempat dan waktu penelitian.
4. Bab IV adalah inti dari penelitian ini, berisikan hasil dan pembahasan yang berisikan sub-bab yakni, deskripsi data penelitian – termasuk profil lokus penelitian dalam hal ini Pengajian Al-Hidayah, pembahasan hasil penelitian yang terdiri dari uraian jawaban dari rumusan masalah dengan analisis mendalam yang dikaitkan dengan kerangka pemikiran penelitian ini.
5. Terakhir, Bab V memuat penutup yang berisikan sub-bab yakni simpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi untuk proyeksi penelitian ke depan dari hasil penelitian ini.

Oleh karena itu, dengan susunan lima bab tersebut, penelitian ini disajikan secara sistematis dan komprehensif agar pembaca memperoleh pemahaman yang runtut dan terarah dalam menelusuri setiap tahapan penelitian. Penyusunan struktur ini tidak hanya membantu kelancaran alur pemaparan, tetapi juga menjamin bahwa setiap komponen penting dalam penelitian memiliki ruang yang proporsional untuk dikaji dan dikembangkan secara optimal.